



Kebijakan Pemerintah Tentang Hasil Akreditasi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah Di Dki Jakarta

Samsul Arifin¹, Muhammad Syaifuddin², Tuti Andriani³

¹) UIN SUSKA, Pekanbaru, Indonesia, 22190614700@students.uin-suska.ac.id

²) UIN SUSKA, Pekanbaru, Indonesia, muhammadsyaifuddin74@gmail.com

³) UIN SUSKA, Pekanbaru, Indonesia, tutiandriani@uin-suska.ac.id

Korespondensi Penulis: Samsul Arifin

Abstrak: Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif kelayakan suatu program pendidikan terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi dilakukan dengan membandingkan keadaan sekolah yang sebenarnya dengan delapan kriteria (standar) yang ditetapkan. Dalam praktiknya, pemenuhan dan pengembangan delapan standar secara berkelanjutan mengarah pada terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Penyelenggaraan akreditasi harus mampu mendorong atau menciptakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan pendidikan dan memberikan arah untuk evaluasi diri secara terus menerus, serta mendorong upaya terus menerus untuk mutu yang diharapkan, sehingga secara tidak langsung dapat menjamin suasana yang kondusif bagi pertumbuhan pendidikan. kualitas pendidikan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui hasil akreditasi BAN SD dan Madrasah Ibtidaiyah DKI Jakarta, mulai dari tujuan hingga permasalahan pelaksanaan akreditasi. BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Nasional Provinsi (BAN-S/M Provinsi) dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Hasil Akreditasi, Mutu Pendidikan, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Dinas Pendidikan saat ini dalam memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan akreditasi sekolah. Masalah akreditasi menjadi penting dan mendesak sejak ditetapkannya standar nasional pendidikan melalui Peraturan Pemerintah No. Pasal 19 SNI Pendidikan 2005. Untuk menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyusun Rencana Strategis Pendidikan Umum Pendidikan Islam 2010-2014, di mana penyelesaian akreditasi sekolah menjadi prioritas.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, salah satunya dengan standarisasi penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikan. Proses ini tercermin dalam pelaksanaan akreditasi yang menilai

kelayakan program pada satuan pendidikan terkait dengan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah, Dinas Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia hendak menyelaraskan program kerjanya dengan rencana pembangunan nasional bidang pendidikan. Hal tersebut tertuang dalam strategi pengembangan pendidikan Islam (2010-2014), dimana salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan sekolah adalah akreditasi BAN S/M seluruh sekolah pada tahun 2014 dan 50% diantaranya dapat terakreditasi minimal B maksimal A+.

Dalam konteks lain, program LAPIS (Program Bantuan Belajar Sekolah Islam) yang didukung oleh Pemerintah Australia telah berpengalaman membantu sekolah untuk mempersiapkan akreditasi BAN S/M. Program pendampingan tersebut dikenal dengan Program Integrasi LAPIS yang mencakup 60 Sekolah (SD dan SMP) yang tersebar di 3 (tiga) provinsi (Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat) sejak Juli 2009 hingga Mei 2010. Program tersebut membantu sekolah mendapatkan akreditasi dengan nilai memuaskan, dimana 18 dari 60 sekolah terakreditasi dan sisanya terakreditasi masih menunggu kuota BAN S/M.

Berdasarkan pengalaman tersebut, LAPIS menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Percepatan Akreditasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk digunakan sebagai model alat pelaksanaan program percepatan akreditasi sekolah. Proses implementasi program dari manual ini menjelaskan langkah-langkah atau kegiatan yang dilaksanakan selama program integrasi LAPIS, membuat beberapa perubahan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lainnya dalam skala yang lebih besar (nasional) untuk mendukung Departemen Pendidikan Madrasah Kementerian Agama. Dalam mencapai tujuan kinerja Negara Republik Indonesia tahun 2014.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif, karena dalam pelaksanaan evaluasi ini akan mencari informasi yang dalam dan luas untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari suatu objek yang dievaluasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi evaluatif/evaluasi, karena ingin mengevaluasi suatu program/kegiatan dalam satu unit tertentu (Arikunto, 2013), dalam hal ini adalah hasil akhir akreditasi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang dilaksanakan oleh BAN S/M untuk unit sekolah dasar yang ada di Jakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi hasil akreditasi BAN S/M SD dan SMA Kota Batam dari kelompok sasaran hingga permasalahan pelaksanaan akreditasi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Sholikhah & Soenarto, 2014)

Teknik sampling penelitian menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik sampling yang satuan samplingnya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik atau kriteria yang dikehendaki dalam pengambilan sampel.”

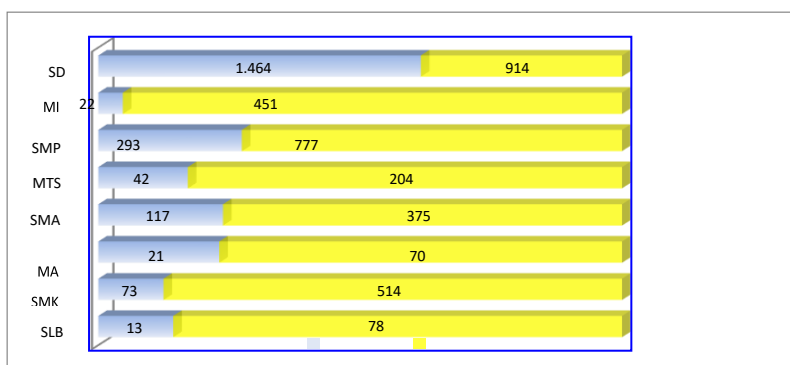
HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian evaluasi menggunakan model CSE-UCLA yang fokus pada hasil akreditasi Sekolah di DKI Jakarta, maka ada beberapa hal yang telah dievaluasi di antaranya dari populasi sekolah madrasah yang ada di Kota Batam. Kemudian sasaran seluruh sekolah, Ketersediaan anggota BAN-S/M dan tim sekretariat. Jumlah asesor dari semua tingkat sekolah. Penyebaran asesor ke seluruh wilayah DKI Jakarta.

Faktor pendukung, hambatan, dan temua sekolah yang ada di Kota Batam. Populasi Sekolah di Kota Batam berdasarkan sumber data dapodik, data EMIS dan data Internal BAN S/M DKI Jakarta pada bulan November 2022 sebanyak 5.428 S. Dijelaskan dalam diagram

yang ada pada gambar di bawah ini.

Pada bagian ini haruslah menjawab masalah atau hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.



Gambar 1. Diagram Populasi Sekolah/Madrasah DKI Jakarta.

Dari data gambar di atas kita dapat melihat bahwa terdapat tingkatan sekolah dimulai dari dasar hingga menengah atas kejuruan. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di enam wilayah yang ada di Kota Batam. Data tersebut kemudian terbagi lagi menjadi sebaran Sekolah Negeri dan Swasta serta terdapat juga Madrasah Negeri dan Madrasah Swasta. Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah SD dan Madrasah Ibtidaiyah terbanyak di antara jenjang sekolah lainnya, yaitu 2.851. Dibandingkan dengan SMA dan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1.316, diikuti SMA, SMK dan Madrasah Aliyah sebanyak 1.171.

Kemudian yang terakhir adalah SLB sebanyak 91 sekolah. Oleh karena itu, peneliti menjelaskan secara lebih rinci fokus penelitian yaitu Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Provinsi DKI Jakarta.

Ditemukan 2.851 SD di Provinsi DKI Jakarta dan 1.464 SD Negeri di Madrasah Ibtidaiyah. 914 sekolah dasar swasta. Kemudian ada 22 Madrasah Ibtidaiyah negeri dan 451 Madrasah Ibtidaiyah swasta provinsi DKI. Yakni Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu. Secara khusus terbagi menjadi enam wilayah, yaitu Jakarta Utara, SD Negeri dan Swasta, 349 SD, 70 Jakarta Timur, 640 SD Negeri dan Swasta, 130 SD dan Madrasah Swasta, Jakarta Barat dan 55 9 sekolah dasar umum. sekolah dasar swasta. 118 SD dan SD Swasta. 498 SD Negeri dan Swasta di Jakarta Selatan. 139 SD dan SD Swasta. 278 SD Negeri dan Swasta di Jakarta Pusat. 15 SD dan SD Swasta. Kemudian yang terakhir adalah Kepulauan Seribu dengan 1 SD Negeri dan 1 Madrasah Ibtidaiyah Negeri. DKI dari berbagai sekolah/madrasah di Provinsi DKI Jakarta. Seperti dalam perintah presiden BANSM no. 125/BAN-SM/SK/2019 tentang Penetapan 11 Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2022 pada Februari 2019. Namun, pada Juli lalu, salah satu anggota Provinsi DKI Jakarta mengundurkan diri sebagai BAN-S/M karena menjadi pejabat struktural di Kantor Kementerian Agama Daerah. Karena itu, tidak kurang dari 10 anggota BAN-S/M di Provinsi DKI berasal dari berbagai bidang pendidikan. Mulai dari guru, pensiunan guru, pengawas, dosen dan dosen.

Anggota BAN-S/M yang berjumlah orang tersebut dibantu dalam pelaksanaan tugasnya oleh tim kesekretariatan yang beranggotakan 7 orang. Terbagi menjadi 3 UPKK, 2 tim IT dan 2 sekretaris. Masing-masing melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang ditugaskan kepadanya. Sekretariat didirikan untuk mendukung program dan kegiatan BAN-S/M provinsi. Sekretariat BAN-S/M Provinsi DKI beralamat di LPMP DKI Jakarta, Wisma Anyelir, Lt.2 Jl. Nangka Raya 60, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta BAN-S/M. Akreditasi tidak dapat bekerja hanya dari lembaga pendidikan saja,

tetapi untuk terjun langsung ke lapangan, harus ada yang langsung bekerja untuk itu. Artinya lapangan disini adalah sekolah dan orang yang mewakilinya disebut evaluator. Evaluator merupakan sumber daya yang dimiliki oleh BAN S/M dan merupakan salah satu penggerak keberhasilan BAN S/M dalam menunaikan tugasnya yaitu mengevaluasi keefektifan unit diklat. Meskipun evaluator merupakan partner BAN S/M dalam hubungan misi, namun perannya sangat strategis karena evaluator memiliki kewenangan untuk menghubungi langsung unit diklat untuk menilai kelayakan unit diklat yang dikunjungi.

Sebagai narasumber yang kritis, para analis berada di garis depan dalam mengevaluasi kesesuaian sekolah, terlepas dari apakah sekolah tersebut memenuhi standar pendidikan nasional atau tidak. Begitu pentingnya peran pendamping dalam kegiatan kunjungan, BAN S/M selalu berusaha melindungi mereka dari segala sisi terhadap kedua standar tersebut, etika dan integritas.

BAN S/M memahami kerentanan posisi evaluator, terutama saat mengunjungi unit-unit pelatihan. Untuk menjamin obyektivitas hasil akreditasi, BAN S/M selalu membekali evaluator dengan norma dan standar etika yang harus diikuti oleh evaluator saat mengunjungi unit-unit diklat. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan dalam proses akreditasi.

Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Penilai (UKA) tahun 2022, diketahui 9 asesor lulus UKA dari 245 peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti UKA. Dari 9 orang pelintas UKA, mereka berhak mengikuti pelatihan asisten IASP 2022. Berdasarkan hasil pelatihan, 90 asesor dinyatakan lulus. Jadi berdasarkan jenjang pendamping, di Provinsi DKI Jakarta terdapat 90 orang dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel,1

NO	Jenjang	JP	JB	JU	JS	JT	Kep. Seribu	Jumlah
1	SD/MI	4	9	7	7	14	-	41
2	SMP/MTS	2	3	3	3	9	-	20
3	SMA/MA	-	2	1	7	4	-	14
4	SMK	1	1	3	4	4	-	13
5	SLB	-	-	-	1	1	-	2
Jumlah		7	15	14	22	32	-	90

Sumber : BAN-S/M Kemendikbud

Asesor Berdasarkan Jenjang di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Menurut tabel di atas tidak berdasarkan tempat tinggal penilai, melainkan berdasarkan tempat bekerjanya, mengingat sebagian besar penilai tidak memiliki tempat tinggal yang sama dengannya. tempat kerja . Mayoritas penilai bersertifikat resmi berada di wilayah Jakarta Timur (35,55%), diikuti wilayah Jakarta Selatan (24 44, %). Wilayah Jakarta Barat 16,66%, Jakarta Utara 15,55% dan Jakarta Pusat 7,77%. Dilihat dari tingkatannya, terdapat 1 penilai pada tingkat SD dengan persentase sebesar 5,6%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara menyeluruh terhadap kesesuaian suatu satuan studi atau program yang hasilnya tercermin dalam pengakuan dan klasifikasi kualifikasi yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang mandiri dan profesional. Tujuan akreditasi sekolah adalah untuk memperoleh gambaran tentang keadaan dan efisiensi sekolah serta untuk menentukan kelayakan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai sarana pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Metode penelitian ini adalah kualitatif, karena dalam pelaksanaan evaluasi ini akan mencari informasi yang dalam dan luas untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari suatu objek yang dievaluasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi

evaluatif/evaluasi, karena ingin mengevaluasi suatu program/kegiatan dalam satu unit tertentu (Arikunto, 2013), dalam hal ini adalah hasil akhir akreditasi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang dilaksanakan oleh BAN S/M untuk unit sekolah dasar yang ada di Jakarta.

Berdasarkan penelitian evaluasi menggunakan model CSE-UCLA yang fokus pada hasil akreditasi Sekolah di Provinsi DKI Jakarta, maka ada beberapa hal yang telah dievaluasi di antaranya dari populasi sekolah madrasah yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian sasaran seluruhsekolah, Ketersediaan anggota BAN-S/M dan tim sekretariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius, A. (2017). PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR
- Awaludin, A. A. R.(2017).Akreditasi Sekolah sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*,2(1).
<https://doi.org/10.30998/sap.v2i1.1156>
- Busron, B., & Rachmi, T. (2020). Analisis Capaian Standar dan Pemanfaatan Hasil Akreditasi PAUD Provinsi Banten. *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(2), 1.
- Depag RI, 2008,*Pedoman Akreditasi Madrasah*,Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam
- Fernades, H. J. X. (1984). *Evaluation of Educational Programs*. National Education Planning, Evaluation and Cultural Development.
<https://doi.org/10.31000/ceria.v1i1i2.2335>
- Divayana, D.G H.(2017).Evaluasi
<https://doi.org/10.51826/fokus.v14i2.44>
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian*
- Jamal Ma'mur Asmani, 2011,*Tips praktis membangun dan mengolah administrasi sekolah*,:Diva Press,cet.1, Jogjakarta
- NEGERI. *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang.*,14(2).
- pelaksanaan blended learning di SMK TI Udayana menggunakan model CSE- UCLA. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 7(1).<https://doi.org/10.21831/jpv.v7i1.12687>
- Suatu Pendekatan Proposal*. PT RinekaCipta.
- Suharsimi Arikunto, 1988,*Penilaian Program Pendidikan*,Bina Aksara: Jakarta